

DETERMINASI TINGKAT PENGUNGKAPAN BANK SYARIAH DI BEBERAPA NEGARA

Krisno Septyan

Jurusan Akuntansi, UPN Veteran Jakarta

Email: krisno.septyan@upnvj.ac.id; kris.tyan26@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/jakis.v6i2.11>

ABSTRACT

The purpose of this study was determine the impact of Shariah Supervisory Boards' Characteristic and Audit Firm Size against Disclosure Level. Shariah Supervisory Boards (SSB)'s Characteristic measured with Islamic Governance (IG) Score are include existent, background of education (economics and syariah), experience in economic (cross-membership and reputation in economics) and number of SSB. Audit firm size was proxied with dummy between big4 and non big4. For disclosure level measured with formulating disclosure index based on Shariah Enterprise Theory. Formulating index is compilation from few index in previously researchs. Sampel from six countries are Indonesia, Malaysia, Bahrain, Qatar, Iran and United Kingdom. Result show that all independent variables are significant to disclosure levels both with normal measure and sensitivity test.

Keywords: *Audit Firm Size, Disclosure, Shariah Supervisory Board, Shariah Enterprise Theory*

1. PENDAHULUAN

Entitas syariah sangat berkembang belakangan ini. Bukti yang memperkuat perkembangan entitas syariah adalah Pembentukan Standar Akuntansi Keuangan Syariah karena beragam transaksi syariah yang ada. Penentuan PSAK Syariah tersebut banyak berkiblat dari organisasi Islam di Timur Tengah bernama *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution* (selanjutnyadisebut AAOIFI) (Harahap, 2001).

Harahap (2002) dalam penelitiannya menemukan bahwa standar pengungkapan yang diterbitkan AAOIFI masih memiliki paham filosofi kapitalis yang kental. Sedangkan Hameed et al (2003) mencoba memformulasikan indeks pengungkapan yang lebih komprehensif namun lebih banyak pada indeks CG. Formulasi indeks pengungkapan lainnya untuk entitas syariah adalah *Islamic Social Reporting (ISR)* yang merupakan modifikasi beberapa peneliti terdahulu Haniffa (2002), Maali et al (2006) dan Othman et al (2009) menggambarkan corak sosial.

Keterangan di atas merupakan beberapa pengenalan indeks pengungkapan syariah dari berbagai macam sudut pandang. AAOIFI konsen pada pelaporan keuangan, ISR konsen pada pengungkapan yang bersifat sosial, dan IDI mencoba mengembangkan indeks agar lebih komprehensif, penelitian lain juga banyak yang melakukan determinan pengungkapan-pengungkapan. Peneliti mencoba mengambil beberapa faktor salah satunya

adalah Dewan Pengawas Syariah, ukuran KAP dan beberapa variabel sebagai variabel kontrol.

Prasetyoningrum (2004) bahwa terjadi penurunan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah di bank syariah. Salah satunya dikarenakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum mengawasi secara optimal.

Peneliti terdahulu meneliti bahwa DPS memberikan pengaruh yang signifikan atas kehadiran, kompetensinya terhadap pengungkapan di entitas syariah di 14 Negara dalam penelitian Farook, et al (2011). Namun DPS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan di beberapa Negara yang ditemukan oleh Rizkiningsih (2012).

Faktor lain yang dianggap sebagai pengaruh besarnya tingkat pengungkapan adalah kualitas audit. DeAngelo (1981) menyatakan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) menentukan kualitas audit. Faktanya KAP besar memiliki hubungan dengan AAOIFI dan menerbitkan buku hasil survey perkembangan lembaga keuangan syariah dan regulasi-regulasi di Timur Tengah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan di atas, memiliki regulasi berbeda di setiap negara seperti Dewan Pengawas Syariah yang menjabat di bank syariah, di Indonesia berasal dari Majelis Ulama Indonesia, di Bahrain berasal dari AAOIFI di Malaysia berasal dari bank sentral, di Inggris berasal dari Bahrain, di Iran tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Untuk Ukuran KAP yang besar memang memiliki cabang di berbagai negara, apakah hal ini juga akan mempengaruhi pemberian service kepada klien. Hal lain yaitu populasi muslim, apakah menjadi faktor yang mempengaruhi juga dalam memberikan informasi di laporan tahunan untuk menjaga kredibilitas bank syariah

Adapun beberapa tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis tingkat pengungkapan bank syariah yang diukur dengan indeks pengungkapan berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* (2) untuk membuktikan secara empiris pengaruh DPS terhadap tingkat pengungkapan bank syariah dan (3) untuk membuktikan secara empiris bank syariah yang diaudit oleh KAP *the big four* memiliki tingkat pengungkapan lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah yang tidak diaudit dengan KAP *non-big four*

2. TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan Standar *governance* yang diterbitkan AAOIFI di Bahrain, pengertian DPS adalah badan independen yang dikhususkan sebagai ahli hukum dalam bidang *fiqh muamalah* (komersial). Namun syarat lainnya bisa juga ahli dalam bidang lembaga keuangan syariah dan memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang *fiqh muamalah*. DPS dipercaya berkewajiban langsung mereview dan mengawasi aktifitas lembaga keuangan syariah untuk

memastikan bahwa entitas tersebut patuh pada peraturan dan prinsip Syariah Islam.

2.2 PENGEMBANGAN INDEKS PENGUNGKAPAN DENGAN SHARIAH ENTERPRISE THEORY

Awalnya akuntansi berpedoman pada *proprietary theory* yaitu memiliki arti bahwa entitas bertanggung jawab atas kekayaan pemegang saham atau dengan kata lain pemegang saham merupakan pusat pertanggungjawaban (pemegang saham sebagai *participant*). Kemudian teori tersebut berkembang menjadi *entity theory* dimana perkembangan dan keberlanjutan perusahaan menjadi hal penting dan terpisah dengan pemilik saham itu sendiri (pemegang saham menjadi *outsider*), maka timbul hubungan *principal and agent*. Triyuwono (2012) menyatakan bahwa kedua teori tersebut sangat memiliki nilai *egoistic* yaitu hanya mementingkan pihak manajemen dan pemilik saham dengan mengabaikan *stakeholder* lainnya. Padahal dalam syariah melarang kekayaan hanya beredar pada golongan tertentu. Dengan konsep *khalifahtulloh fil Ardh* dalam teori akuntansi syariah menerangkan bahwa manusia sebagai pemegang amanah untuk menyebarkan kesejahteraan kepada seluruh *stakeholder*, maka *Shariah enterprise theory* dianggap menjadi solusi.

Triyuwono (2012) menyatakan bahwa *Shariah Enterprise Theory* merupakan dasar kegiatan bank syariah secara menyeluruh karena teori ini memperhatikan seluruh *stakeholder* dibanding teori-teori sebelumnya. *Stakeholder* yang dimaksud tidak hanya kepada pihak-pihak yang berkontribusi langsung terhadap *profit*, tapi juga kepada pihak yang tidak berkontribusi secara langsung dalam menghasilkan *profit*, termasuk mengakui keberadaan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi.

Harahap (1997) dalam Triyuwono (2012) yang menyatakan "... Enterprise Theory menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat" ditambahkan oleh Triyuwono (2012) menyatakan "akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholder* (termasuk alam) dan Tuhan"

Namun akuntansi masih memiliki sifat mendunia yang memahami bahwa perusahaan merupakan amanah, maka manajemen sebagai pengelola harus memberikan laporan yang dapat diukur secara manusiawi yaitu melalui pengungkapan yang memberikan informasi bahwa entitas syariah tersebut memperhatikan seluruh *stakeholder*. Sehingga penyajian pengungkapan tersebut memberikan informasi bahwa entitas memperhatikan hubungan dengan manusia (*stockholder*, investor, karyawan, nasabah dan sosial) dan hubungan entitas dengan alam. Pengungkapan kepada Tuhan tidak harus tertulis dalam laporan tahunan perusahaan karena meyakini Tuhan Maha Mengetahui (*a'lim*).

Dengan demikian, entitas syariah secara seimbang dapat menggambarkan nuansa akuntansi dan syariah seperti yang dinyatakan oleh Triyuwono (2006 dan 2012) memperkenalkan Epistemologi Berpasangan,

yang terdapat dalam (QS. 36:36). Adapun isi dari QS 36:36 adalah sebagai berikut:

“ Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Untuk pengukuran pengungkapan, peneliti mengkombinasi standar dari Timur Tengah dan Malaysia, adapun standar dari Timur Tengah yang diterbitkan oleh AAOIFI yaitu standar pengungkapan pelaporan keuangan, *Islamic Reporting Index* dan dari Malaysia adalah *Islamicity Disclosure Index* yang mencakup *Shariah Cmplinace*, *Governance* dan *Environmental/Social reporting*.

Karena ada kesamaan beberapa point pada setiap indeks, peneliti menggabungkan beberapa indeks agar saling melengkapi (Septyan, 2016). Contoh: dalam IDI dan AAOIFI hanya menyarankan indeks bahwa bank syariah harus mengeluarkan laporan sumber dan penggunaan zakat, tapi ISR memberikan perincian indeks mengenai zakat lebih detail, seperti metode perhitungan zakat apa yang digunakan, mengapa ada dana zakat yang tidak disalurkan. Contoh di atas diharapkan memberikan gambaran secara detail dalam satu point seperti contoh di atas yaitu zakat. Langkah berikutnya peneliti menghilangkan indeks yang dianggap tidak dapat diterapkan secara umum dan yang tidak sesuai dengan prinsip dan hukum Islam.

Jika dilihat berdasarkan tujuan, indeks yang dikeluarkan AAOIFI memiliki tujuan pengungkapan lebih banyak kepada *owner* dan *investor*. Indeks lain adalah *Islamicity disclosure indeks* (IDI) merupakan suatu alternatif indeks yang dikeluarkan oleh Hameed (2003) yang mencakup berbagai aspek. Termasuk yang menggambarkan karakteristik bank syariah, terlihat dalam komponen *shariah compliance*. Komponen *governance* merupakan suatu hal penting dalam menjalankan usaha, dan komponen *social/environmental* menyajikan suatu pertanggungjawaban kepada pihak luar dan internal (karyawan) selama menjalankan operasional bank syariah.

Dilain hal, ISR yang merupakan ciri khas dari *Corporate Social Responsibility* cukup memadai untuk informasi yang disajikan kepada sosial (sesama) dan lingkungan. Secara implisit ISR menyajikan lebih detail mengenai *social* dibanding pada dua *disclosure* lainnya. Karena ISR fokus pada dan sosial (sesama), maka aspek-aspek dalam pelaporan keuangan kurang diperhatikan.

Sedangkan standar dari AAOIFI memberikan gambaran akuntansi yang sangat kental, karena tertulis jelas pengungkapan tersebut untuk pelaporan keuangan. Padahal dalam Triyuwono (2012) menyiratkan makna bahwa akuntansi adalah disiplin dan praktik yang dibentuk dan membentuk lingkungannya. Dari pernyataan ini member makna bahwa akuntansi syariah dibentuk dari entitas syariah seharusnya membentuk *output* yang bernafaskan Islami yaitu secara seimbang tidak hanya pada pelaporan keuangan saja tapi juga pada kepedulian sosial.

Setelah melakukan kompilasi beberapa akun. Kemudian ada beberapa point indeks akun yg dihapus dalam tiga sumber indeks (standar pelaporan

keuangan AAOIFI, *Islamicity Disclosure Index* (IDI) dan *Islamic Social Reporting* (ISR) *Index*) seperti *energy saving*, manajemen lingkungan. Mengingat bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan pembiayaan serta memberikan jasa perbankan lainnya bukan fokus pada lingkungan hidup dan fakta yang menunjukkan bahwa pada struktur organisasi bank syariah tidak ada manajemen yang mengatur mengenai lingkungan, maka poin tersebut tidak diperlukan sehingga keluar dari indeks.

Indeks lain yang dikeluarkan adalah *governance* (IDI) karena (1) berupa angka seolah memberikan kesan sebuah kewajiban, padahal tidak setiap negara memiliki peraturan dengan angka terkait tersebut (2) untuk penelitian berikutnya, jika variabel independen menggunakan CG maka tidak akan terjadi hubungan kausalitas dan (3) dalam peraturan BAPEPAM, tidak pernah termuat pengungkapan untuk *governance* (PBI mensyaratkan pengungkapan laporan CG, (4) beberapa bank membuat laporan CG tersendiri di luar *Annual Report*

Indeks lain yaitu rasio gaji antar *gender* pada Indeks *Islamic Social Reporting* dihapus, karena tidak sesuai dengan QS. An-Nahl ayat 97 yang tidak membedakan upah pekerja antar *gender*. Ayat tersebut memberi makna bahwa baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan upah yang layak dan tidak membedakan *gender*.

Value Added Statement adalah *point* yang ada di indeks IDI, dan yang mengejutkannya pada penelitian Hameed et al (2013) juga tidak satu pun Bank Syariah baik Bank Bahrain maupun Bank Syariah di Malaysia mengeluarkan *Value Added Statement*. Dalam tataran teoritis pun, Triyuwono (2012) dan Mulawarman (2008) menyatakan *Value Added Statement* merupakan gagasan atas laporan keuangan syariah sebagai pengganti Laporan Laba Rugi.

2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.3.1 Hubungan Karakteristik DPS terhadap Tingkat Pengungkapan

Di Indonesia, DPS merupakan kepanjangan tangan DSN yang memiliki fungsi sebagai pemantau atas kinerja bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan inovasi produk-produk syariah. Sehingga untuk patuh terhadap syariah ditentukan juga oleh banyaknya DPS dengan beragam pandangan dan pengalaman.

Namun berdasarkan fakta yang ada menunjukkan penetapan DPS hanya sebagai pelengkap perundang-undangan, hal ini menyebabkan adanya skeptisme atas kompetensi DPS. Dengan adanya sikap amanah DPS menjadi selalu memperbaharui informasi agar syariah tidak hanya sesuai syariah dalam pernyataan DPS tapi juga dapat dibuktikan melalui pengungkapan-pengungkapan yang menunjukkan karakteristik syariah dari standar luar negeri.

Hal yang memperkuat alasan di atas, peneliti mengambil contoh dari Indonesia adalah DPS dari DSN yang merupakan salah satu pihak yang

merumuskan PSAK Syariah banyak berkiblat dari standar yang diterbitkan AAOIFI. Di Malaysia dan Bahrain sebagian DPS merupakan Anggota AAOIFI. Dengan demikian, seharusnya DPS dapat lebih *update* dan mengetahui seluk beluk segala standar AAOIFI mengenai standar pengungkapan untuk lembaga keuangan syariah. *Update* mengenai standar dari luar dilihat juga dari latar belakang pendidikan dalam bidang ekonomi, keuangan, perbankan dan akuntansi sehingga melihat kompetensi DPS mempengaruhi dalam dunia perbankan.

Farook et al (2011) menyatakan juga latar belakang pendidikan setiap Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh penting dalam pengungkapan terhadap CSR, kerelevanan pendidikan setiap dewan pengawas syariah seharusnya dalam bidang bisnis dan syariah. AAOIFI pun merekomendasikan anggota yang menduduki jabatan Dewan Pengawas Syariah seharusnya memiliki *background* yang berbeda seperti ekonom, banker dan lainnya yang masih berhubungan dengan dunia perbankan. Didukung oleh AAOIFI (2003) dalam Farook et al (2011) menyatakan bahwa AAOIFI mensyaratkan baik DPS dan *financial auditors* bank syariah untuk melaporkan ketaatan syariah. Dan dalam salah satu indeks IDI memuat bahwa salah satu DPS harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Sehingga, *background* pendidikan merupakan bagian penting dalam penentuan DPS dalam bank syariah.

Dalam peraturan Malaysia dan *Standar Governance* dari AAOIFI menyebutkan bahwa selain DPS memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, bisa juga memiliki latar belakang syariah dan memiliki pengalaman di lembaga keuangan syariah. Farook et al (2011) menambahkan penghitungan DPS dengan *IG-Score* juga mengkategorikan DPS memiliki pengalaman di bidang ekonomi dan sebagainya. Maka pengalaman ekonomi patut dipertimbangkan dalam penentuan Dewan Pengawas Syariah di bank syariah.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah kedudukan DPS lebih dari satu lembaga keuangan syariah sehingga memiliki pengalaman dan pengamatan berbagai kondisi lembaga keuangan syariah. Seperti Farook et al (2011) dan Rizkiningsih (2012) mengukur DPS dengan menilai dari berbagai aspek tidak hanya pada kompetensi tapi juga kedudukan DPS menempati lebih dari satu lembaga, jumlah DPS pun menjadi pertimbangan karena semakin banyak DPS akan menambah pengetahuan dari setiap rapat atau diskusi DPS tersebut.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Dahya (1996) dalam Farook et al (2011) bahwa *cross-directorship* menghasilkan perbandingan pengetahuan dari entitas lainnya. Haniffa dan Coke (2002, hal.321) dalam Farook et al (2011) juga mengatakan bahwa DPS *cross-membership* akan selalu berdiskusi lebih banyak dengan DPS lainnya. Berdasarkan pernyataan di atas dengan didukung peneliti terdahulu dan standar yang ada, maka terbentuklah hipotesa:

H1: Karakteristik DPS berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan

2.3.2 Hubungan Ukuran KAP terhadap Tingkat Pengungkapan

Dalam Baros et al (2013) menerangkan DeAngelo (1981) menyarankan bahwa ukuran auditor sebagai proksi untuk kualitas audit dan menyediakan kualitas pelayanan yang lebih tinggi dan memelihara reputasi klien dan menghindari kehilangan *customer*, dengan demikian informasi yang diungkapkan lebih akurat, detail dan lebih komprehensif.

Dalam sebuah pengantar AAOIFI (2003), Farook et al (2011), Hameed et al (2003), KAP *big four* memiliki relasi dengan AAOIFI. Fakta lain adalah beberapa KAP besar membuat buku hasil survey di timur tengah yang didalamnya memperkenalkan AAOIFI dan beberapa standar AAOIFI. Selain itu mengingat KAP *big four* memiliki cabang di berbagai Negara, memungkinkan untuk berbagi (*sharing*) peraturan Negara lain yang menunjukkan KAP *big four* memiliki wawasan lebih luas. Sehingga KAP besar memiliki kemungkinan akan lebih patuh terhadap standar-standar yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah luar negeri.

Dalam Farook et al (2011) dan Hameed et al (2003) menyatakan bahwa AAOIFI mensyaratkan baik DPS dan *financial auditors* bank syariah untuk melaporkan ketaatan syariah. Hal ini memperkuat pernyataan di atas bahwa KAP akan memberikan pelayanan lebih termasuk dalam hal pengungkapan dalam laporan tahunan. Berdasarkan pernyataan di atas didukung argumen peneliti terdahulu, maka terbentuklah hipotesa:

H2: Bank syariah yang diaudit oleh KAP big four memiliki tingkat pengungkapan lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah yang tidak diaudit dengan KAP non-big four

3. METODE PENELITIAN

3.1 DATA DAN SAMPEL

Sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu yang memiliki kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti. Adapun kriteria sampel adalah sebagai berikut: (1) Diakses melalui website www.aibim.com, (2) Berbentuk Bank Umum Syariah dan memiliki website (3) Disajikan dalam Bahasa Inggris dan atau Bahasa Indonesia dan (4) Menyediakan annual report pada web bank syariah tersebut

Peneliti tidak menggunakan sampel Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah bagian/divisi/unit syariah yang ada di bank konvensional. Karena Laporan tahunan masih merangkap dengan bank konvensional sehingga sulit membedakan pengungkapan mana yang menjadi pengungkapan UUS itu sendiri dengan pengungkapan induknya (bank konvensional).

Perolehan data diambil dari www.aibim.com yang memuat daftar bank syariah di beberapa negara dan memberikan akses menuju website bank syariah di setiap negara. Adapun ukuran sampel sebanyak 106 tahun perusahaan.

3.2 PENGUKURAN VARIABEL

3.2.1 Variabel Dependen

Tingkat Pengungkapan, merupakan informasi yang tersaji mengenai bank syariah dalam laporan tahunan setiap perusahaan dengan pengembangan indeks yang telah dilakukan peneliti berdasarkan telaah literatur. Adapun garis besar tingkat pengungkapan tersebut mencakup beberapa tema yaitu informasi bagi investor, sosial dan sesama serta alam/lingkungan (Septyan, 2016).

Nilai indeks tersebut diperoleh dengan cara mendikotomi, yaitu 1 jika komponen tersebut diungkapkan dan 0 bila tidak diungkapkan berpedoman pada *keyword*. Kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan *score* pengungkapan.

3.2.2 Variabel Independen

a. Dewan Pengawas Syariah

Perhitungannya diukur dengan jumlah dewan pengawas syariah, *cross-membership*, latar belakang pendidikan ekonomi dan atau syariah, memiliki pengalaman ekonomi dan sebagainya. Setiap komponen diberi nilai 1 bila ada dan 0 bila tidak memiliki syarat-syarat, kemudian dijumlah untuk mendapatkan IG-Score tersebut. Mengikuti perhitungan Farook (2011) dengan modifikasi seperti Rizkiningsih (2012) mengurangi beberapa perhitungan DPS. Pada Penelitian ini hanya mengganti yang memiliki pendidikan Ph.D menjadi “Baksyar” karena dalam standar *governance* AAOIFI menyarankan bahwa salah satu DPS harus ada yang memiliki *background* pendidikan syariah/hukum. Dengan demikian maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$DPS = Ada + \text{jumDPS} + \text{crossmem} + \text{BackEko} + \text{Back Syar} + \text{PengEk}$$

Keterangan:

Ada	=	1 jika memiliki DPS, dan 0 jika tidak memiliki DPS (Farook, 2011)
JumDPS	=	1 jika jumlah DPS 3 orang atau lebih, dan 0 jika jumlah DPS kurang dari 3 orang (Farook, 2011)
Crossmem	=	1 jika ada DPS yang berkedudukan DPS di tempat lain, dan 0 jika sebaliknya (Farook, 2011)
BackEko	=	1 jika ada DPS yang memiliki latar belakang pendidikan, ekonomi/manajemen/akuntansi/perbankan dan sejenisny, dan 0 jika tidak (Farook, 2011)
BackSyar	=	1 jika ada DPS yang memiliki latar belakang pendidikan hukum/ syariah, dan 0 jika tidak
PengEk	=	1 jika DPS memiliki reputasi atau pengalaman dalam bidang ekonomi/keuangan/perbankan syariah, dan 0 jika tidak (Farook, 2011)

Angka-angka tersebut dijumlahkan untuk memperoleh nilai DPS. Dengan demikian, nilai DPS maksimal adalah enam.

b. Ukuran KAP

Adalah auditor independen bank syariah. Ukuran KAP diproksikan dengan model *dummy* seperti yang dilakukan pada penelitian Baros et al (2013), Kelton dan Yang ((2004) yaitu: 1= KAP *big four* (Deloitte, Ernst&Young, KPMG dan PWC), dan 0 = selain KAP *big four*

3.2.3 Variabel Kontrol

a. Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan Total Aset setiap bank syariah, kemudian disamakan ke dalam satu jenis mata uang (US Dollar) seperti dilakukan oleh Farook et al (2011), setelah itu di-Logaritma Naturalkan untuk menghindari heteroskedastisitas. Ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel control pada beberapa peneliti terdahulu diyakini sebagai pengukuran yang konsisten terhadap pengungkapan Kelton and Yang (2004), Hardiyanti (2010), Galani *et al* (2011) dan Baros *et al* (2013). Argumentasi mengenai besarnya perusahaan mempengaruhi pengungkapan terdapat pada *agency* dan *positive accounting theory* bahwa manajer menggunakan pengungkapan sebagai bagian strategi untuk mengurangi *agency cost* (Watts and Zimmerman, 1978).

b. Profitabilitas (ROE)

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *Return on Equity* (ROE) yaitu laba bersih dibagi ekuitas, data diperoleh dari laporan keuangan bank syariah. Peneliti lebih memilih ROE karena beberapa peneliti terdahulu menggunakannya untuk melihat pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan seperti Kelton dan Yang (2004), Karim dan Ahmed (2005) Rizkiningsih (2011). Alasan lain Lesakova (2005) menyatakan pemilihan rasio keuangan bagi bank seperti ROA yang menunjukkan return dari aset mempertanyakan apakah seluruh akun di dalam aset seperti kas turut serta dalam menghasilkan pendapatan. Selain itu, ekuitas lebih menchapter debt karena merupakan aset dikurangi hutang. Maka peneliti mengambil ROE sebagai variabel pengendali. Kemudian peneliti melihat rata-rata dari kedua ratio tersebut dengan hasil bahwa ROE memiliki rata-rata positif yang mendekati pada hipotesis.

c. Populasi Muslim (POLIM)

Populasi muslim dalam penelitian ini menggunakan rasio penduduk muslim. Variabel ini digunakan oleh Farook et al (2011) dan Rizkiningsih (2012). Semakin banyak penduduk muslim, maka bank syariah akan semakin

menjaga nama baik perusahaan karena bank syariah menyadari sebagai instrumen keuangan bagi masyarakat tersebut. pengukurannya yaitu dengan membagi total penduduk muslim dengan total penduduk per Negara. Data di peroleh melalui *Central Intelligence Agency (CIA) World Factbook* pada website melalui internet yaitu www.cia.gov/library/publication/the-world-factbook/

3.3 MODEL PENELITIAN

Model penelitian dapat dilihat pada persamaan di bawah ini:

$$\text{Discl}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{KAP}_{it} + \beta_2 \text{DPS}_{it,1,2} + \beta_3 \text{Size}_{it} + \beta_4 \text{ROE}_{it} + \beta_5 \text{Polim}_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

Discl = tingkat pengungkapan

B_0 = konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = koefisien regresi

DPS = karakteristik Dewan Pengawas Syariah dengan dua pengukuran

KAP = 1 untuk KAP big four dan 0 untuk non big four

Size = Ukuran Perusahaan (Logaritma natural Total aset)

ROE = Profitabilitas (Return on Equity)

Polim = Populasi Muslim

ε = error

Selain uji utama dengan model dan pengukuran seperti yang telah dijelaskan di atas, dilakukan uji sensitivitas yaitu dengan mengubah pengukuran variabel DPS dengan mengurangi komponen "keberadaan DPS" sehingga angka maksimalnya adalah 5, dan bank syariah yang tidak memiliki DPS dikeluarkan dari sampel.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 ELIMINASI SAMPEL

Berdasarkan informasi perolehan data, tidak semua laporan tahunan setiap bank syariah dapat diperoleh. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Eliminasi Sampel

Keterangan pengeliminasian sampel	Jumlah sampel
Jumlah Negara dalam website www.aibim.com	51
Bank syariah yang bisa diestimasi bisa diakses	60
▪ Web bank syariah masih dalam perbaikan	(10)

▪ Bahasa asing (arab, thailand, turkey, dan lainnya)	(19)
Total bank syariah yang bisa diakses annual report	31

Dari tabel 1. di atas menunjukkan ada 31 bank syariah yang bisa diakses. Beberapa bank syariah tidak dapat di akses *annual report*-nya karena ada yang tidak memiliki web, peneliti terkendala dengan bahasa asing seperti Arab, Thailand, Turkey dan lainnya). Serta beberapa memiliki *website* yang masih dalam perbaikan.

5.2 STATISTIK DESKRIPTIF

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Dependen

	Indonesia	Malaysia	Bahrain	Qatar	Iran	UK	All
Maksimal	26	17	23	16	13	13	26
Minimal	9	10	10	10	9	13	9
Rata-rata	17,91	13,13	15,53	13,28	11	13	15,24
N	34	24	32	7	8	1	106

Cronbach's Alpha = 0.749

Secara keseluruhan, rata-rata pengungkapan bank syariah dari ketiga negara tersebut sebesar 15,24 point atau setengah kurang sedikit (0,26) dari seluruh indeks pengungkapan. Untuk tiga negara dengan jumlah sampel yang besar, Indonesia merupakan negara yang menyandang predikat pengungkapan dengan *score* maksimal dan *score* minimal. Hal ini mengindikasikan peningkatan pengungkapan di Indonesia dari tahun ke tahun cukup signifikan dibanding negara lainnya.

Tabel 3. Statistik Variabel Independen

Variabel	Mean	Maks	Min
DPS	4,764	6,000	0,000
Size (US\$)	3.330.306.960	42.794.730.000	9.749.814
ROE	0,064	0,6777	-1,1371
Polim	0,784	0,980	0,027

Berdasarkan tabel 3 menjelaskan mengenai rata-rata deskriptif variabel independen DPS, Size dan ROE. Variabel DPS memiliki nilai rata-rata 4.318 yang mendekati nilai maksimal yaitu 5. Ini mengindikasikan karakteristik dewan pengawas syariah sebagian besar memenuhi standar yang ada. Untuk populasi muslim, tertinggi berada di Iran dan terendah 2,7% berada di Inggris dengan rata-rata populasi muslim adalah 78,4%

Tabel 4. Frekuensi Variabel Independen Dummy (KAP)

	Ukuran KAP	
	Big4	Non-Big4
Frekuensi	79	27
Persentase (%)	74,5	25,5

Variabel dummy yaitu Ukuran KAP pada tabel 4.5. menunjukkan bahwa 79 bank syariah menggunakan KAP besar atau sebesar 74,5% dari total sampel. Sisanya, 27 bank sebesar 25,5% menggunakan KAP non besar.

5.3 PENGUJIAN HIPOTESIS

Setelah melalui uji asumsi klasik dengan kesimpulan bahwa data-data yang digunakan tidak mengalami bias, maka peneliti melanjutkan meregresi dengan hasil dari Eviews 6 sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Berganda

$$Discl_{it} = \beta_0 + \beta_1 KAP_{it} + \beta_2 DPSAll_{it} + \beta_3 Size_{it} + \beta_4 ROE_{it} + \beta_5 Polim_{it} + \varepsilon$$

Variabel	Ekspek sign.	Coef.	p-prob
C		-4.4130	0.4194
KAP	+	3.8176	0.0045***
DPS	+	0.5534	0.0589**
Size	+	0.4261	0.0569**
ROE	+	3.1364	0.0258**
Polim	+	6.4961	0.0297**

*, **, *** signifikan masing-masing pada level 10%, 5% dan 1%. didasarkan pada two-tailed test untuk prediksi yang ditandai. Fstat p-prob 0.0000., Adj. R²=57,46%

Ket. Variabel: KAP1 untuk *big four* dan 0 untuk *non big four*; DPS sesuai pengukuran awal; LnSize = Ukuran Bank Syariah (Logaritma natural Total aset); ROE = Return on Equity; Polim = persentase Populasi muslim dari seluruh penduduk per Negara

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terbukti berpengaruh positif bahwa Ukuran KAP memberikan kualitas audit, penyediaan jasa dan memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai entitas syariah karena pengalaman dan relasi dengan lembaga syariah seperti AAOIFI dibanding KAP yang tidak besar. Sehingga dapat memberikan masukan-masukan kepada klien, termasuk dalam penyajian pengungkapan. Maka KAP besar yang dipilih klien bank syariah dapat menjadi pertimbangan untuk memberikan nilai lebih bagi bank syariah.

DPS berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan, sehingga dalam memilih DPS dengan memperhatikan *background* pendidikan, dan pengalaman. Harus ada yang memiliki *background* pendidikan ekonomi dan syariah, sedangkan pengalaman DPS bisa dari pengalaman dalam bidang keuangan/perbankan dan sejenisnya serta pengalaman sebagai DPS di lembaga keuangan syariah lain. Semua hal tersebut merupakan karakteristik DPS yang berkompeten untuk menjabat di bank syariah. Bahkan jika perlu, diadakan *fit and proper test* dalam memilih dan mengangkat DPS.

Untuk variabel profitabilitas. Walaupun pada hakikatnya bank syariah tidak hanya mementingkan profit, namun juga mementingkan *stakeholder*

lainnya seperti sosial dan alam. Namun profitabilitas menjadi dukungan atas pemberian informasi dalam pengungkapan di laporan tahunan perusahaan.

Populasi muslim juga sangat mempengaruhi pengungkapan. Karena banyaknya muslim memberikan iklim ingin tersedianya instrumen keuangan berbasis syariah sebagai prinsip kehalalan dalam berinvestasi dan menyimpan uang mereka. Sehingga hal ini menjadi dorongan bagi lembaga keuangan syariah untuk tetap menjaga nilai-nilai kebaikan di mata masyarakat, salah satunya dengan pengungkapan.

Tabel 6. Hasil Uji Sensitivitas

$$Discl_{it} = \beta_0 + \beta_1 KAP_{it} + \beta_2 DPS_{it} + \beta_3 Size_{it} + \beta_4 ROE_{it} + \beta_5 Polim_{it} + \varepsilon$$

Variabel	Ekspek sign.	Coef.	p-prob
C		-6.6948	0.2240
KAP	+	2.9007	0.0308**
DPS	+	0.4205	0.2058
Size	+	0.4930	0.0428**
ROE	+	3.6082	0.0136***
Polim	+	10.7063	0.0007***

*, **, *** signifikan masing-masing pada level 10%, 5% dan 1%. didasarkan pada two-tailed test untuk prediksi yang ditandai. Fstat p-prob 0.0000., Adj. R²=53,44%

Ket. Variabel: KAP1 untuk *big four* dan 0 untuk *non big four*; DPS dengan pengubahan pengukuran “keberadaan DPS” dihilangkan; LnSize = Ukuran Bank Syariah (Logaritma natural Total aset); ROE = Return on Equity; Polim = persentase Populasi muslim dari seluruh penduduk per Negara

Uji sensitivitas di atas dilakukan dengan cara merubah pengukuran variabel DPS dengan melihat *background* ekonomi, *background* syariah, *crossmembership*, jumlah DPS dan pengalaman ekonomi. Satu pengukuran dihilangkan yaitu “keberadaan” DPS, karena penentu atas *score* lainnya, di anggap satu pengukuran tersebut tidak relevan dengan lainnya. Dengan demikian, bank syariah yang tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah di keluarkan dari sampel, sehingga total sampelnya sebanyak 96 bank syariah.

Dapat dilihat bahwa hanya DPS yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan yang mungkin disebabkan karen DPS belum konsen pada hal pengungkapan, namun jika memasukan bank syariah yang tidak memiliki DPS dengan pengukuran awal, maka DPS berpengaruh signifikan karena menggambarkan tingkat pengungkapan yang lebih baik bank syariah yang memiliki DPS dan yang tidak seperti pada tabel 6 di atas.

5. SIMPULAN

Dari seluruh pengujian empiris yang telah dilakukan, maka kesimpulannya sebagai berikut (1) *Content analysis* menunjukkan bahwa bank-bank syariah masih lebih banyak konsen pada pengungkapan pelaporan keuangan dibandingkan dengan pengungkapan yang bersifat sosial kepada seluruh

stakeholder. (2) Pemilihan KAP menjadi penting dalam menaikkan nilai kebaikan perusahaan dalam hal pengungkapan pada laporan tahunan. (3) Karakteristik DPS berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan, menunjukkan DPS ikut memajukan nilai-nilai kebaikan bagi bank syariah. Dengan demikian pemilihan DPS dapat dilihat dari kompetensi, jika perlu adakan *fit and proper test* dalam pemilihan dan pengangkatan DPS. (4) Profitabilitas menjadi hal penting, Karena semakin besar profitabilitas bank maka semakin tinggi pengungkapan pada bank syariah, karena bisa mengeluarkan biaya lebih banyak dalam membuat pengungkapan. (5) Populasi Muslim sangat mempengaruhi sebagai bentuk menjaga kredibilitas bank syariah di mata masyarakat yang menginginkan instrumen keuangan syariah.

Beberapa keterbatasan pada penelitian ini adalah (1) Jumlah sampel sangat sedikit hanya pada enam Negara, serta jumlah bank umum syariah masih relatif sedikit dan tidak menggambarkan kesimpulan secara global. (2) Pengembangan indeks hanya merujuk pada tiga standar pengungkapan saja, dan tidak membedakan antara pengungkapan yang wajib dengan pengungkapan sukarela. (3) Variabel pengendali yang digunakan adalah variabel pengendali yang bisa dipakai pada peneliti terdahulu yang bukan bank syariah, sedangkan dalam struktur pelaporan keuangan cukup berbeda sehingga apakah cocok atau tidak rasio keuangan tersebut yang menggambarkan bank syariah

Terkait dengan keterbatasan penelitian yang ada, maka penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu: (1) Menambahkan jumlah Negara dan bank syariah sehingga dapat menyimpulkan hasil secara mendunia dan tambah variabel untuk menyempurnakan model penelitian. (2) Tambahkan telaah literature pada indeks pengungkapan yaitu regulasi dari Negara lain agar indeks pengungkapan bisa digunakan diseluruh dunia yang bisa membedakan pengungkapan mana yang wajib dengan sukarela. Telaah lainnya yaitu dengan pendekatan nilai-nilai agama agar lebih mantap dalam mencerminkan indeks pengungkapan baik secara umum dan secara syariah. Dan (3) Menambahkan variabel pengendali seperti rasio keuangan yang menggambarkan rasio kinerja perbankan syariah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2010). *Accounting, Auditing and Governance Standar o Islamic Financial Institutions*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution. Manama, Bahrain
- Baros, C. P., Boubaker, S. & Hamrouni, A. (2013). Corporate Governance and Voluntary Disclosure in France. *Journal of Applied Business Reseach*. 29(5), pp 561-577

- DeAngelo, L.E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economic*, 3(3), pp 183 – 199.
- Farook, S., Hassan, M.K. Lanis, R.(2011). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. 2(2), pp 114-141
- Galani, D., Gravas, E. & Stavropoulos, A. (2011). The Relation Between Firm Size and Environmental Disclosure. *International Conference on Applied Economics*, pp 179-186
- Hameed, A. Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., (2003). Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks. Paper Presented in the International Conference on Information System and Islam at the IIUM. Kuala Lumpur. Hal. 1-34
- Haniffa, R. (2002). Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective. *Indonesian Management and Accounting Research*. 1(2), pp. 128-146
- Harahap, S.S., (2001). Kritik Terhadap Perbankan Syariah, IAI & AAOIFI. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, 1(3), Universitas Trisakti
- Harahap, S.S., (2002). The Disclosure of Islamic Value – annual Report The Analysis of Bank Muamalat Indonesia's Annual Report. *Journal of Islamic Economics. Iqtisad*.
- Hardiyanti, S.(2012). Analisis Hubungan Shari'a Governance Structure Terhadap Tingkat Pengungkapan CSR pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Indonesia
- Kelton, A dan Yang, A. (2004). Impact of Corporate Governance to Internet Financial Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 1(27), pp 68 – 87
- Lesakova, L. (2007). Uses and Limitation of Profitability Ratio Analysis in Managerial Practice. 5th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking. Matej Bel University
- Mulawarman, A.D. (2008). Laporan Keuangan Syari'ah Berbasis Tazkiyah. *Disertasi*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang
- Rizkiningsih, P. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan ISR: Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia dan Negara-negara GCC. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Septyan, K. (2016). Reformulasi Indeks Pengungkapan Bagi Entitas Syariah dan Keunikan Kebijakan Syariah di Beberapa Negara. *Jurnal Equity* 19(2), Jakarta.
- Triyuwono, I. (2006). Akuntansi Syariah: Menuju Puncak Kesadaran Tuhan Manunggaling Kawulo-Gusti. Pidato Pengukuhan Guru Besar Akuntansi Syariah. Universitas Brawijaya. Malang

Triuwono, I. (2012). *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, edisi dua. Jakarta. Rajawali Pers.